

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adji, Indriyanto Seno, 2009, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Diadit Media, Jakarta.
- Adji, Oemar Seno, 1984, *Hukum-Hakim Pidana*, Erlangga, Jakarta.
- Ali, H. Zainudin, 2019, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Asmarawati, Tina, 2015, *Pidana Dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia (Hukum Penitensier)*, Deepublish, Yogyakarta.
- Danil, Elwi, 2011, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana Dan Pemberantasannya*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Dirdjosisworo, Soedjono, 1984, *Sejarah Dan Asas Penologi*, Armico, Bandung.
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2009, *Himpunan Peraturan Tentang Pemasyarakatan*.
- Durkheim, Emile, 1999, *Law in Moral Domain*, Yale University Press, New Haven.
- Zulfa, Eva Achjani, 2013, *Naskah Akademik RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan*, Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional BPHN, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 1986, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- _____, 1993, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Johnson, Alvin S., 2007, *Sosiologi Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Kuffal, H.M.A., 2008, *Penerapan Kuhap Dalam Praktik Hukum (Edisi Revisi)*, UMM Press, Malang.
- Lotulung, Paulus E., 1986, *Beberapa Sistem Tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah*, Bhuana Pancakarsa, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

- Mertokusumo, Sudikno, 2018, *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Nawawi, Hadari & Martini Hadari, 2006, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Philippe Nonet & Philip Selznick, 2018, *Hukum Responsif*, Nusa Media, Bandung.
- Panjaitan, Petrus Irwan & Pandapotan Simorangkir, 1995, *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Prasetyo, Bambang & Lina Mifathul Jannah, 2008, *Metode Penelitian Kuantitatif: Teori Dan Aplikasi*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Priyatno, Dwidja, 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Yogyakarta.
- _____, 2010, *Penegakan Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta
- Reksodiptro, Mardjono, 2007, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan Dan Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- _____, 2013, *Perenungan Perjalanan Reformasi Hukum*, Komisi Hukum Nasional RI, Jakarta.
- Riduwan, 2009, *Dasar-Dasar Statistika*, Alfabeta, Bandung.
- Riti, Hyronimus, 2011, *Filsafat Hukum*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Shidarta, 2018, *Hukum Penalaran Dan Penalaran Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Soehartono, Irawan, 2000, *Metode Penelitian Sosial*, Remaja Rosdakarya, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Alfabeta, Bandung.

Surachmin & Suhanda Cahaya, 2015, *Strategi dan Teknik Korupsi: Mengetahui Untuk Mencegah*, Sinar Grafika, Jakarta.

Suteki, 2013, *Desain Hukum di Ruang Sosial*, Thafa Media, Yogyakarta.

Suteki & Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*, Rajawali Pers, Jakarta.

Tunick, Mark, 1992, *Punishment: Theory And Practice*. University of California Press, California.

Wisnubroto, Al & G. Widiartana, 2005, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya, Bandung, hlm.

Wojowasita, S., 1999, *Kamus Umum Belanda Indonesia*, Ichtiar Baru, Jakarta.

Zulfa, Eva Achjani, Anugrah Rizki Akbari & Zakky Ikhsan, 2017, *Perkembangan Sistem Pemidanaan dan Sistem Pemasyarakatan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

_____, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang *Pemasyarakatan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614.

_____, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang *Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75.

_____, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang *Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69.

_____, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 Tentang *Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 61.

_____, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang *Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan*

Pemasyarakatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5359.

_____, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang *Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 282.

_____, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 *Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 893.

_____, Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Nomor M.02.PR.08.03 Tahun 1999 tentang *Pembentukan Balai Pertimbangan Pemasyarakatan dan Tim Pengamat Pemasyarakatan*.

_____, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Kep/26/M.Pan/2/2004 tentang *Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik*.

Rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan (Versi Januari 2021)

C. Jurnal, Makalah Tesis dan Disertasi

Aggi Rafsanjani Akbar, Lushiana Primasari, “Urgensi Pengetatan Remisi Narapidana Korupsi Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan”, *Recidive*, Vol. 8, No. 2, Mei-Agustus 2019.

Analisa Ilmiah, Abdul Madjid dan Eny Harjati, 2014, Analisis Yuridis Kedudukan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Terhadap Kebijakan Pengetatan Pemberian Remisi Bagi Narapidana Korupsi Sebagai Bentuk Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum Universitas Brawijaya*, Februari 2014.

Arif Usman, 2013, “Pembatasan Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi Berkaitan Dengan Tujuan Pemasyarakatan”, *Tesis*, Pascasarjana Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

- Ashad L. Diab, Peranan Hukum sebagai Social Control, Social Engineering dan Social Welfare, *Jurnal Al-Adi*, Vol. 7, No. 2, 2014.
- Basuki Kartono, 2007, “Pemberian Remisi Bagi Narapidana Tindak Pidana Narkotika-Psikotropika, Korupsi, Terorisme Dan Kejahatan Ham Berat”, *Tesis*, Pascasarjana Program Studi Pengkajian Ketahanan Nasional Program Pascasarjana Universitas Indonesia.
- Berlian Simarmata, Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Koruptor dan Teroris, *Mimbar Hukum*, Vol. 23, No. 3, 2011.
- Depri Liber Sonata, Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1.
- Didit Prihantoro, “Pemberian Remisi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Prespektif Hukum Positif”, *Jurnal Transparansi Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2020.
- Dimas Hario Wibowo, Pelaksanaan Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang, *Unnes Law Journal*, Vol. 2, No. 1, 2013.
- Edie Toet Hendratno, “Kebijakan Pemberian Remisi Bagi Koruptor, Suatu Telaah Kritis Dari Perspektif Sosiologi Hukum”, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 44, No. 4, 2014.
- Elizabeth Ghozali, “Urgensi Formulasi Justice Collaborator Sebagai Syarat Perolehan Remisi Bagi Narapidana Korupsi Di Indonesia”, *Fiat Justitia*, Vol. 2, No.1, 2021.
- Emy Julica Tucunan, Hak Remisi Narapidana Tindak Pidana Korupsi, *Lex Crimen*, Vol. 3, No. 1, Januari-Maret 2014.
- Erni & Ruben Achmad, “Kebijakan Hukum Pidana Tentang Remisi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia”, *Legalitas*, Vol. 9, No. 1, 2017.
- Ghafur, Philip Khana & Wirna Rosmeli, Efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Dalam Pemberian Remisi Kepada Narapidana Tindak Pidana Khusus di Padang, *Journal of Swara Justisia*, Vol. 1, No. 4, April 2021.
- Heri Supriyono, 2019, Remisi Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dalam Perspektif Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan, *Disertasi*, Pascasarjana Doktorat Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

- Heru Prabowo Adi, Marlina & Edi Triyono, Analisis Hukum Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Binjai, *Jurnal Ilmiah Hukum Arbiter*, Vol. 1, No. 2, 2019.
- Hilman Nur, “Penghapusan Remisi Bagi Koruptor Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan”, *Jurnal Mimbar Justitia*, Vol. 1, No. 2, 2015.
- I Dewa Made Suartha, I Gede Artha, “Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Denpasar Dalam Pembinaan Narapidana”, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 6, No. 2, 2014.
- Kornelius Benuf & Muhamad Azhar, ‘Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer’, *Gema Keadilan*, Vol 7 No.1, 2020.
- Marcus Priyo Gunarto, “Sikap Memidana Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemidanaan”, *Mimbar Hukum*, Vol. 21, No. 1, Februari 2009.
- Mosgan Situmorang, Aspek Hukum Pemberian Remisi Kepada Narapidana Korupsi, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 16, No. 4, Desember 2016.
- Muh. Guntur, “Kepastian Hukum dan Rasa Keadilan Masyarakat Menuju Indonesia Baru”, *Simposium Internasional Jurnal Antropologi Ke-2*, Padang. 2001.
- Muhammad Arif Rohman, 2013, “Tinjauan Yuridis Pengetatan Remisi Dan Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Kasus Korupsi Di Wilayah Yogyakarta”, *Tesis*, Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Netty Endrawati & Dyah Permatasari, “Pemberian Remisi Bagi Narapidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi”, *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1, 2019.
- Nixson, Syafruddin Kalo, Tan Kamello & Mahmud Mulyadi, “Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Dan Justice Collaborator Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, *Usu Law Journal*, Vol.II, No.2 Nov-2013.
- Novita, Pelaksanaan Remisi Dalam Tindak Pidana Korupsi, *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 1, 2019.

- Priandia Riski, Dampak Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Sosiologis, *Tesis*, Universitas Pancasila, Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Hlm 55;
- Purwoto S. Gandasubrata, “Peran Dan Tanggung Jawab Hakim Pengawas dan Hakim Pengamat Terhadap Putusan Pidana”, *Makalah Seminar Nasional Kajian Hukum Pidana LK2 SM-FHUI*, Jakarta, 1991.
- RB Soemanto, Sudarto & Sudasana, Pemahaman Masyarakat Tentang Korupsi, *Yustisia*, Vol.3 No.1 Januari-April 2014.
- Suprisma Werok, Hak Remisi terhadap Narapidana Berdasarkan PP. 32 Tahun 1999, *Lex Crimen*, Vol. 8, No. 3, 2019.
- Theresiye Elfrida Wulur, Pemberian Remisi Bagi Narapidana Korupsi Di Indonesia Berdasarkan PP No. 99 Tahun 2012, *Lex Crimen*, Vol. 9, No. 3, 2020, Hlm.
- Winston Rori, Kebijakan Hukum Mengenai Syarat Pemberian Remisi Kepada Narapidana Tindak Pidana Korupsi, *Lex Crimen*, Vol. 2, No. 7, 2013.
- Yuni Adiati Adhyani, “Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Dikaitkan Dengan Hak Asasi Manusia Terpidana”, *Jurnal Hukum Universitas Riau*, Vol. 3, No. 1, 2016.
- Yunita Octavia Siagian, Alvi Syahrin & Rafiqo Lubis, “Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Koruptor Yang Berkedudukan Sebagai Justice Collaborator”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara*, Vol. 1, No. 2, 2018.

D. Internet

- Direktorat Jendral Pemasyarakatan. “Sejarah Pemasyarakatan”.
[Http://ditjenpas.go.id/sejarah](http://ditjenpas.go.id/sejarah).
- Haryanti Puspa Sari, “Usulan Pemerintah, RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Dikeluarkan Dari Prolegnas Prioritas 2021.”,
<https://nasional.kompas.com/read/2020/11/24/08342531/usulan-pemerintah-rkuhp-dan-ruu-pemasyarakatan-dikeluarkan-dari-prolegnas?page=all>.
- Hukumonline, “ICW: Cabut Segera Edaran Resmi Pro Koruptor”,
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt53f37cde7c605/icw--cabut-surat-edaran-remisi-pro-koruptor>.

Fitria Chusna Farisa, “Catatan ICW Atas RUU Pemasyarakatan, Hak Rekreasi Hingga Permudah Pembebasan Koruptor”, <https://nasional.kompas.com/read/2020/05/17/18313591/catatan-icw-atas-ruu-pemasyarakatan-hak-rekreasi-hingga-permudah-pembebasan?page=all>,.

Sri Utami, Revisi KUHP, Revisi UU ITE Dan RUU Pemasyarakatan Masuk Prolegnas 2021, <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/432910/revisi-kuhp-revisi-uu-ite-dan-ruu-pemasyarakatan-masuk-prolegnas-2021>.

Tatang Guritno, “Data ICW 2020: Kerugian Negara Rp 56,7 Triliun, Uang Pengganti Dari Koruptor Rp 8,9 Triliun”, <https://nasional.kompas.com/read/2021/03/22/19301891/data-icw-2020-kerugian-negara-rp-567-triliun-uang-pengganti-dari-koruptor-rp>.

Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) Publik, <http://sdppublik.ditjenpas.go.id/>.